

ABSTRAK

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di beberapa negara di Asia, sehingga berdampak juga kepada perekonomian di Indonesia. Krisis tersebut diperkuat karena diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang disertai dengan isu permasalahan mengenai likuidasi dari beberapa bank swasta. Hal tersebut berdampak pada *rush* penarikan dana pada bank-bank swasta terkait. Untuk membantu bank-bank yang terkena isu tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam proses keberjalanan terdapat berbagai permasalahan hukum, termasuk pada perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Bank Indonesia yang merupakan institusi pemerintah, dapat menjadikan Kejaksaan sebagai perwakilannya untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam penelitian menggunakan Pendekatan Doktrinal, dimana meneliti peraturan hukum positif, asas-asas terkait, dan studi kepustakaan. Dalam penyelesaian perkara BLBI, terdapat berapa institusi yang memiliki irisan wewenang dengan Kejaksaan. Kejaksaan berwenang untuk membantu memberi tindakan hukum dalam penyelesaian perkara BLBI.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Bidang Perdata dan Tata Usaha (DATUN), BLBI*

ABSTRACT

In 1997 there was a monetary crisis in several countries in Asia, so it also had an impact on the economy in Indonesia. The crisis was strengthened due to the issuance of Government Regulation Number 44 of 1997 which was accompanied by issues regarding the liquidation of several private banks. This has an impact on the rush to withdraw funds from the relevant private banks. To help banks affected by this issue, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI). In the running process there are various legal problems, including civil and state administrative cases. Bank Indonesia, which is a government institution, can use the Prosecutor's Office as its representative to resolve the problem. The research uses a doctrinal approach, which examines positive legal regulations, related principles, and literature studies. In resolving BLBI cases, there are several institutions that have an intersection of authority with the Prosecutor's Office. The prosecutor's office has the authority to assist in providing legal action in resolving BLBI cases.

Kata Kunci: *Prosecutor, Civil and Administrative Sector (DATUN), BLBI*